

Perempuan Papua Dalam Advokasi Hak Asasi Manusia dan Diplomasi Akar Rumput Sebagai Bagian dari Studi Hubungan Internasional

Darwin Mezhak Loduwik Rumpumbo^{1*}, Palmer Wilibald Beking Cornellisen¹, Yeyen Subandi¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author : darwinrumpumbo023@mail.com

Article History:

Received : 04-07-2025

Accepted : 10-07-2025

Keywords: Perempuan Papua; Advokasi HAM; Diplomasi Akar Rumput; Feminisme; Hubungan Internasional

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran perempuan Papua dalam advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan diplomasi akar rumput, yang selama ini sering kali terabaikan dalam kajian utama hubungan internasional. Dengan metode pendekatan kualitatif dan studi pustaka, penelitian ini menelusuri bagaimana struktur patriarki, hambatan politik, serta marginalisasi historis berpengaruh terhadap partisipasi perempuan Papua dalam ruang publik, termasuk dalam memperjuangkan keadilan sosial dan perdamaian. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun berada dalam tekanan struktural dan kultural, perempuan Papua membangun gerakan resistensi yang berakar pada komunitas lokal, menggunakan pendekatan diplomasi akar rumput dan solidaritas lintas aktor. Penelitian ini juga mengkaji kontribusi tokoh-tokoh feminis seperti Gayatri Spivak, Chandra Talpade Mohanty, dan bell hooks dalam membingkai perlawanan perempuan sebagai bagian dari narasi global tentang keadilan gender dan hak asasi manusia. Temuan ini menegaskan pentingnya mengakui dan memasukkan pengalaman serta suara perempuan Papua sebagai bagian dari agenda hubungan internasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.

PENDAHULUAN

Isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua telah menjadi perhatian nasional dan internasional selama lebih dari lima dekade. Di balik dinamika politik yang kerap difokuskan pada konflik separatisme dan keamanan, terdapat kelompok rentan yang menghadapi penindasan berlapis dan sering kali terpinggirkan dari diskursus utama, yaitu perempuan Papua. Mereka tidak hanya menjadi korban kekerasan fisik dan seksual dalam situasi konflik, tetapi juga mengalami ketidakadilan struktural dalam bentuk marginalisasi ekonomi, sosial, dan budaya. Laporan Komnas Perempuan (2021) mencatat bahwa perempuan Papua menghadapi bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang sering tidak diakui atau ditindaklanjuti oleh lembaga negara.

Namun, dalam keterbatasan ruang politik formal, sejumlah perempuan Papua justru tampil sebagai aktor penting dalam memperjuangkan keadilan melalui advokasi akar rumput yang menjangkau ranah global. Mereka memanfaatkan jaringan masyarakat sipil internasional, organisasi non-pemerintah (NGO), media global, dan forum-forum hak asasi manusia untuk menyuarakan ketidakadilan yang dialami masyarakat Papua. Tokoh-tokoh seperti Mama Yosepha Alomang, seorang pejuang hak tanah dan lingkungan hidup, serta Veronica Koman, aktivis HAM yang aktif membangun jejaring internasional, menjadi contoh dari keterlibatan perempuan Papua dalam diplomasi non-negara.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa perempuan Papua tidak sekadar menjadi korban, tetapi juga agen politik yang mampu melintasi batas negara dalam memperjuangkan HAM. Dalam konteks studi hubungan internasional, hal ini menantang narasi dominan yang memosisikan negara sebagai aktor utama. Sebaliknya, perempuan Papua menunjukkan bagaimana aktor non-negara dari wilayah pinggiran dapat mengintervensi diskursus internasional melalui diplomasi akar rumput (*grassroots diplomacy*). Pendekatan ini merefleksikan bentuk partisipasi global dari bawah yang berbasis pada pengalaman hidup, solidaritas lintas batas, dan jejaring transnasional. Untuk memahami fenomena ini, penting menggunakan lensa feminisme post-kolonial, yang menyoroti bagaimana perempuan di wilayah bekas koloni seperti Papua yang menghadapi penindasan ganda akibat patriarki dan kolonialisme struktural (Mohanty, 1988).

Selain itu, teori transnasionalisme feminis sebagaimana dijelaskan oleh Keck dan Sikkink (1998) dalam *Activists Beyond Borders*, dapat menjelaskan bagaimana isu lokal diangkat ke panggung global melalui kerja sama lintas negara. Dalam konteks Papua, kerja sama ini tampak dalam advokasi bersama antara perempuan Papua dan organisasi seperti Amnesty International, Human Rights Watch, serta media global seperti Al Jazeera dan BBC. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perempuan Papua membangun strategi advokasi HAM melalui diplomasi akar rumput dan jaringan transnasional, serta bagaimana strategi tersebut berdampak pada persepsi dan respons internasional terhadap isu Papua. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji hambatan-hambatan struktural yang dihadapi perempuan Papua dalam perjuangan mereka.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai peran aktor non-negara, khususnya perempuan dari wilayah konflik seperti Papua, dalam studi hubungan internasional kontemporer. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan alternatif narasi terhadap dominasi perspektif negara-sentris, serta menyoroti pentingnya keadilan gender dan keadilan sosial dalam wacana HAM global.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2016), model penelitian kualitatif bersifat induktif, di mana peneliti membiarkan permasalahan muncul dari data atau membiarkan data berkembang untuk diinterpretasikan secara mendalam. Dalam praktiknya, data dikumpulkan melalui pengamatan dokumen secara teliti, termasuk deskripsi rinci terhadap konteks sosial-politik yang melatarbelakangi advokasi perempuan Papua. Peneliti juga melakukan analisis terhadap catatan, laporan, dan narasi, baik dari sumber primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang dialami oleh subjek dari penelitian, seperti pelaku, pandangan, dan tindakan mereka. Metode ini dianggap paling sesuai untuk menggali secara mendalam dinamika keterlibatan perempuan Papua dalam advokasi hak asasi manusia dan diplomasi akar rumput yang tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif. Dua tujuan utama pendekatan kualitatif adalah untuk menjelajah dan menggambarkan (*to explore and to describe*), serta memberikan penjelasan yang bersifat mendalam (*to explain and describe*) (Sugiyono, 2016). Oleh karena itu, pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami

secara utuh proses, strategi, dan tantangan yang dihadapi perempuan Papua dalam perjuangan mereka di ranah internasional.

PEMBAHASAN

Perjuangan perempuan Papua dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat dilepaskan dari konteks historis kolonialisme, marginalisasi sistematis, dan budaya patriarki yang mengakar baik dalam struktur adat maupun negara. Dalam ruang yang serba terbatas, perempuan Papua tidak hanya menjadi korban dari kekerasan struktural, tetapi juga muncul sebagai aktor yang aktif dalam diplomasi akar rumput dan advokasi keadilan. Melalui pengalaman langsung dan pendekatan berbasis komunitas, mereka telah membentuk ruang-ruang resistensi yang khas, berakar pada tradisi lokal, namun mampu menjangkau forum global. Pembahasan berikut akan menguraikan dinamika ini dalam tiga bagian utama. Pertama, melihat bagaimana perempuan Papua tampil sebagai agen advokasi hak asasi manusia dari lensa feminisme postkolonial. Kedua, mengidentifikasi berbagai tantangan struktural yang mereka hadapi dalam ruang sosial dan politik. Dan ketiga, mengeksplorasi bagaimana perempuan Papua memanfaatkan media dan jejaring internasional untuk memperluas pengaruh diplomasi akar rumput mereka dalam tatanan hubungan internasional kontemporer.

Perempuan Papua Sebagai Agen Advokasi HAM dan Diplomasi Akar Rumput: Perspektif Feminisme Postkolonial

Perempuan Papua telah lama menghadapi kondisi penindasan yang berlapis, baik karena identitas gender, etnis, maupun kelas sosial. Dalam realitas sehari-hari, mereka mengalami kekerasan berbasis gender, pengusuran wilayah adat, serta marginalisasi dalam ruang politik dan pengambilan keputusan. Namun demikian, perempuan Papua tidak diam. Mereka telah membangun bentuk-bentuk perlawanan melalui advokasi hak asasi manusia dan diplomasi akar rumput sebagai respon terhadap ketidakadilan struktural. Salah satu tokoh sentral yang mencerminkan peran ini adalah Mama Yosepha Alomang, aktivis perempuan asal Timika, Papua, yang selama bertahun-tahun menyuarakan penolakan terhadap kekerasan militer dan perampasan tanah adat oleh perusahaan tambang. Melalui lembaga yang ia dirikan, Yayasan Hak Asasi Manusia dan Anti Kekerasan (YAHAMAK), Mama Yosepha mengadvokasi korban kekerasan dan membangun solidaritas lintas komunitas. Ia juga pernah berbicara dalam forum internasional untuk menyuarakan penderitaan perempuan Papua.

Peran perempuan Papua ini sejalan dengan konsep “agency” dalam teori feminisme postkolonial. Tokoh seperti Gayatri Chakravorty Spivak dalam esainya “*Can the Subaltern Speak?*” (1988) mempertanyakan apakah perempuan dari kelompok tertindas dapat benar-benar menyuarakan dirinya dalam sistem global yang didominasi Barat dan elite. Dalam konteks Papua, perempuan seperti Mama Yosepha justru membuktikan bahwa perempuan subaltern mampu berbicara dan bertindak secara politis, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga lintas negara. Kontribusi perempuan Papua juga relevan dengan pemikiran Chandra Talpade Mohanty dalam tulisannya “*Under Western Eyes*” (1984), yang mengkritik kecenderungan feminisme Barat dalam mereduksi perempuan Dunia Ketiga sebagai korban pasif. Mohanty mendorong pendekatan yang kontekstual melihat perempuan dalam komunitas adat sebagai aktor dengan pengetahuan lokal, resistensi kolektif, dan strategi yang khas. Perempuan Papua, dalam hal ini, adalah agen transformatif yang tidak hanya menuntut kesetaraan, tetapi juga melawan kekuatan kolonialisme, militerisme, dan kapitalisme global.

Diplomasi akar rumput yang dilakukan oleh perempuan Papua melampaui batas-batas konvensional negara-bangsa. Mereka memanfaatkan jaringan internasional, media, dan solidaritas lintas negara untuk memperkuat tuntutan mereka. Konsep ini dapat dianalisis melalui teori Transnational Advocacy Networks (Keck & Sikkink, 1998), yang menjelaskan bagaimana aktor lokal dapat melibatkan jejaring global untuk memberikan tekanan pada negara atau lembaga yang menutup ruang advokasi.

Dengan demikian, perempuan Papua tidak hanya menjadi bagian dari wacana feminisme global, tetapi juga menciptakan praksis feminisme yang khas yakni feminisme dari akar rumput, berlandaskan adat, spiritualitas lokal, dan solidaritas transnasional. Mereka bukan hanya korban, tetapi juga diplomat tanpa gelar, negosiator tanpa panggung formal, dan penggerak keadilan dalam tatanan hubungan internasional.

Tantangan Struktural Dalam Advokasi dan Diplomasi Akar Rumput: Ketimpangan Gender dan Politik Represif

Perempuan Papua yang berjuang melalui jalur advokasi dan diplomasi akar rumput tidak hanya menghadapi tantangan budaya patriarki lokal, tetapi juga represi negara dan keterbatasan akses terhadap struktur global. Tantangan ini bersifat sistemik dan berlapis, yang berasal dari struktur sosial, politik, ekonomi, dan bahkan epistemik (cara pandang dominan). Budaya patriarki masih sangat kuat dalam masyarakat Papua, baik dalam struktur adat maupun dalam sistem sosial yang dikonstruksi oleh negara. Perempuan seringkali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di ranah publik, termasuk di dalam organisasi masyarakat adat dan kelompok politik lokal. Di sisi lain, mereka juga menghadapi stigma dan kekerasan yang berakar pada peran-peran tradisional yang membatasi mereka dalam ruang domestik saja.

Secara struktural, represi negara terhadap aktivis perempuan Papua menjadi tantangan berat. Perempuan Papua yang vokal terhadap pelanggaran HAM kerap mengalami intimidasi, stigmatisasi, bahkan kriminalisasi. Dalam beberapa kasus, mereka dicap sebagai separatis hanya karena membawa isu pelanggaran hak perempuan dan kekerasan negara ke forum nasional maupun internasional. Kondisi ini mempersempit ruang aman bagi perempuan untuk melakukan diplomasi akar rumput. Tantangan ini dapat dianalisis melalui pemikiran bell hooks, seorang tokoh feminis kulit hitam yang menekankan pentingnya memahami penindasan secara interseksional, yaitu penindasan yang terjadi karena pertemuan antara ras, kelas, dan gender. Dalam konteks Papua, perempuan tidak hanya tertindas karena gender mereka, tetapi juga karena identitas rasial mereka sebagai Orang Asli Papua (OAP), serta posisi mereka dalam struktur ekonomi-politik Indonesia yang masih kolonialistik di Papua.

Lebih lanjut, feminis dari Selatan Global seperti Aili Mari Tripp dan Srilatha Batliwala menekankan bahwa perjuangan perempuan dalam konteks negara-negara berkembang sering harus berhadapan dengan sistem represif, otoriter, dan tatanan hukum yang tidak berpihak. Perempuan Papua, dalam hal ini, menunjukkan bentuk “*political agency*” di luar institusi formal, yaitu dengan membangun kekuatan dari bawah melalui solidaritas komunitas, ritual budaya, hingga media digital.

Selain kekerasan politik, perempuan Papua juga menghadapi tantangan dalam mengakses forum internasional. Keterbatasan pendidikan, sumber daya finansial, dan koneksi global menjadi penghalang bagi banyak perempuan untuk tampil di ruang internasional. Hal ini mengingatkan pada kritik Spivak tentang bagaimana “*subaltern*” sering tidak dapat berbicara di forum global karena tidak diakui oleh sistem wacana dominan. Namun, perempuan

Papua tetap berusaha mengintervensi ruang-ruang tersebut dengan memproduksi narasi tandingan melalui video dokumenter, petisi global, dan aliansi transnasional.

Meskipun tantangannya berat, perempuan Papua terus membangun ruang-ruang diplomasi alternatif yang tidak selalu bersifat formal. Diplomasi ini lahir dari pengalaman hidup mereka, dari trauma yang dikolektifkan menjadi kekuatan sosial. Dalam konteks ini, seperti dijelaskan oleh Donna Haraway melalui konsep *situated knowledge*, pengalaman perempuan Papua adalah pengetahuan yang valid dan sah untuk membentuk pemahaman global tentang keadilan, keamanan, dan perdamaian.

Peran Jejaring Internasional dan Media Alternatif Dalam Memperkuat Diplomasi Perempuan Papua

Di tengah tekanan struktural dari negara dan budaya patriarki, perempuan Papua terus memperluas ruang diplomasi mereka melalui jejaring internasional dan media alternatif. Kanal-kanal ini memungkinkan suara mereka menembus batas domestik, menjangkau komunitas global, serta membangun tekanan internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua. Melalui pendekatan diplomasi akar rumput, perempuan Papua membentuk koneksi dengan berbagai organisasi internasional seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan lembaga PBB seperti UN Permanent Forum on Indigenous Issues. Keterlibatan dalam jejaring ini bukan hanya sebagai korban yang mencari perhatian global, melainkan sebagai subjek politik yang menyampaikan narasi dari pengalaman hidup mereka sendiri. Perempuan Papua menjadikan tubuh, tanah, dan budaya mereka sebagai medium perlawanan yang sah secara politik dan moral.

Veronica Koman, meski bukan OAP, tetapi sebagai perempuan yang aktif mengadvokasi isu HAM Papua secara global, menunjukkan bagaimana media sosial dan solidaritas internasional bisa menjadi alat diplomasi tandingan. Ia menyuarakan berbagai kasus kekerasan negara terhadap warga sipil, termasuk terhadap perempuan dan anak-anak, kepada masyarakat internasional. Upaya ini menjadi contoh konkret bagaimana diplomasi akar rumput memanfaatkan logika komunikasi global untuk memperkuat perjuangan lokal. Dalam konteks teori, peran ini sejalan dengan konsep "*global sisterhood*" yang dikembangkan oleh feminis seperti Charlotte Bunch dan Peggy Antrobus, yaitu ide bahwa solidaritas perempuan lintas bangsa dapat menjadi kekuatan kolektif dalam memperjuangkan keadilan. Namun, penting untuk dicatat bahwa solidaritas ini harus bersifat horizontal, tidak memaksakan nilai-nilai Barat, dan harus berangkat dari pemahaman lokal.

Kajian Chandra Talpade Mohanty juga sangat relevan di sini. Dalam kritiknya terhadap feminisme arus utama Barat, Mohanty menekankan pentingnya mengakui "*lokalitas politik*" dari perjuangan perempuan di Dunia Ketiga. Perempuan Papua, dengan latar belakang budaya, adat, dan spiritualitas yang kuat, membangun bentuk resistensi yang tidak selalu cocok dengan narasi feminisme liberal, tetapi tetap sah dan kuat dalam logika keadilan sosial dan hak asasi. Media digital seperti YouTube, Instagram, dan Facebook telah menjadi "*diplomatic tools*" alternatif yang digunakan oleh perempuan Papua dan para pendukungnya. Video kesaksian korban kekerasan, rekaman demonstrasi damai, hingga kampanye petisi daring telah digunakan untuk menggerakkan simpati global. Strategi ini menunjukkan adanya transformasi dalam praktik diplomasi internasional, di mana aktor non-negara seperti perempuan adat dapat mengklaim posisi dalam percakapan global.

Jejaring internasional juga memungkinkan terciptanya tekanan balik (*boomerang effect*) kepada negara melalui kampanye global. Konsep ini dijelaskan oleh Keck dan Sikkink dalam teori Transnational Advocacy Networks, yang menyebutkan bahwa ketika kanal domestik tertutup, aktivis akan mencari mitra internasional untuk menekan negara dari luar. Perempuan Papua telah menggunakan taktik ini, baik secara langsung maupun melalui solidaritas diaspora dan LSM global. Dengan demikian, diplomasi akar rumput yang dilakukan oleh perempuan Papua bukan hanya soal pengaruh politik, tetapi juga praktik epistemik dan simbolik: mereka sedang menantang siapa yang berhak bicara, siapa yang didengar, dan siapa yang dihitung dalam arena hubungan internasional.

KESIMPULAN

Perempuan Papua telah menunjukkan kapasitas luar biasa sebagai aktor dalam advokasi hak asasi manusia dan diplomasi akar rumput. Dalam konteks yang sarat dengan ketimpangan struktural, diskriminasi rasial, dan budaya patriarki yang kuat, mereka tidak tinggal diam. Justru dari ruang-ruang marginal, perempuan Papua seperti Mama Yosepha Alomang dan berbagai aktivis lokal lainnya membangun perlawanan yang berbasis pada pengalaman hidup, nilai-nilai komunitas, serta solidaritas sosial yang kuat. Mereka membuktikan bahwa aktor non-negara, khususnya perempuan adat, memiliki kekuatan untuk mengintervensi dinamika kekuasaan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Melalui kajian tokoh-tokoh feminis seperti Gayatri Spivak, Chandra Talpade Mohanty, bell hooks, dan Donna Haraway, penelitian ini menegaskan bahwa perjuangan perempuan Papua tidak dapat dilepaskan dari kerangka interseksionalitas dan postkolonialisme. Mereka menghadapi penindasan yang tidak tunggal, melainkan saling berkelindan antara gender, ras, kelas, dan kuasa negara. Namun, dengan memanfaatkan kekuatan diplomasi akar rumput dan dukungan dari jejaring internasional, mereka mampu menciptakan ruang alternatif untuk menyuarakan keadilan. Media sosial, organisasi HAM global, dan forum internasional menjadi sarana penting dalam memperkuat posisi mereka sebagai subjek politik yang sah.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perempuan Papua tidak hanya layak dipandang sebagai bagian dari wacana pemberdayaan lokal, tetapi juga sebagai entitas penting dalam studi hubungan internasional kontemporer. Diplomasi mereka yang bersifat komunitarian, partisipatif, dan berbasis pengalaman langsung menantang batas-batas tradisional dalam studi diplomasi dan politik global. Oleh karena itu, pengakuan atas suara perempuan Papua bukan hanya soal representasi, tetapi merupakan langkah konkret menuju praktik hubungan internasional yang lebih adil, inklusif, dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bhasin, K., & Khan, N. S. (1994). *Some Questions on Feminism and Its Relevance in South Asia*. Kali for Women.
- [2] Fakih, M. (2016). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- [3] Haraway, D. J. (1988). Situated knowledges: The science question in feminism and the privilege of partial perspective. *Feminist Studies*, 14(3), 575–599.
- [4] hooks, b. (2000). *Feminism is for Everybody: Passionate Politics*. South End Press.
- [5] Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Cornell University Press.

- [6] Mohanty, C. T. (2003). *Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity*. Duke University Press.
- [7] Nurmila, N. (2015). Pengaruh budaya patriarki terhadap pemahaman agama dan pembentukan budaya. *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*, 23(1), 1–16.
- [8] Sakina, D., & Hasanah, A. (2014). Budaya patriarki dalam rumah tangga: Studi kasus keluarga petani. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 9(2), 137–150.
- [9] Sossou, M.-A. (2011). We do not enjoy equal political rights: Ghanaian women's perceptions on political participation. *Gender & Development*, 19(3), 421–429.
- [10] Spivak, G. C. (1988). Can the subaltern speak? In C. Nelson & L. Grossberg (Eds.), *Marxism and the Interpretation of Culture* (pp. 271–313). University of Illinois Press.
- [11] Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [12] Wiratri, M. A. (2018). Patriarki dan dominasi maskulinitas dalam keluarga. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 5(1), 1–13.
- [13] Yusalia, S. (2014). Budaya patriarki dalam keluarga Jawa: Studi fenomenologi tentang peran gender. *Jurnal Ilmu Sosial*, 8(2), 45–53.